

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hegemoni negara terhadap rakyatnya adalah permasalahan kompleks yang terjadi dewasa ini. Bukan hanya sekali negara menunjukkan inkonsistensinya melalui beberapa kebijakan publik yang kontroversial, namun terpaksa harus diterima rakyat. Dalam konsep hegemoni, rakyat biasanya mengadopsi nilai moral dan ideologi yang ditanamkan negara melalui berbagai cara. Hegemoni negara ini masuk melalui media massa, jalur pendidikan, dan ruang publik lainnya yang telah menjadi mediator dalam membentuk kesadaran baru masyarakat.

Konsep hegemoni, erat kaitannya dengan tokoh *Antonio Gramsci* dan biasanya digunakan oleh para pengamat politik ataupun sosiolog untuk menganalisa dan menjelaskan bagaimana penguasa mempertahankan kekuasaannya. Penguasa memiliki konteks yang sangat luas, tidak hanya dimaknai sebagai negara saja, tetapi juga kelompok kepentingan (*interest group*). Hegemoni adalah suatu bentuk dominasi kelompok yang satu terhadap yang lain, dengan atau tanpa kekerasan sehingga ide yang didiktekan oleh subjek kuasa bisa diterima dengan wajar (*common sense*)

Negara Indonesia, termasuk ke dalam kategori negara dunia ketiga yang secara peta ekonomi politik dipengaruhi oleh pihak asing melalui neo-liberalisme. Disinilah konsep hegemoni Gramsci memiliki makna dalam perkembangan ideologi kapitalisme. Stabilitas nasional, keamanan, dan perekonomian rakyat menjadi obyek bagi para kapitalis untuk menguasai kehidupan rakyat dalam segala

lini. Kesadaran baru masyarakat inilah yang hendak dibentuk melalui proses hegemoni.

Konsep hegemoni Gramsci memiliki perkembangan dalam ideologi kapitalisme. Proses hegemoni ini terlihat pada kegiatan propaganda, indoktrinasi, iklan, pendidikan dan organisasi. Penindasan dalam bentukan hegemoni tidak selalu berbentuk represif fisik, tetapi bisa berupa suatu mainstream berfikir yang dominan.

Konsep hegemoni bukan hanya strategi eksklusif milik negara (pemerintah) karena kelompok kepentingan pun bisa menjadi bagian dari yang menerapkan hegemoni. Pada kelompok kepentingan (*interest group*), usaha untuk menyebarkan propangandanya terjadi melalui korporatisme. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, korporatisme merujuk pada suatu bentuk pemerintahan jenis baru yang muncul dan berkembang di belahan dunia ketiga (khususnya di negara Amerika Latin). Bentuk pemerintahan ini pertama-tama ditandai dengan dominannya peran kekuatan negara dan pengaturan kelompok-kelompok perwakilan kepentingan dalam masyarakat berdasarkan relasinya dengan negara.

Bentuk pemerintahan seperti ini, dengan demikian jelas merupakan suatu fenomena modern dalam arti kehadirannya didasarkan atas suatu prinsip legal formal. Pembentukan dan juga pengakuan atas kelompok perwakilan kepentingan yang ada tidak semata-mata berdasarkan kepentingan negara, seperti pada model pemerintahan militer, dan juga tidak semata-mata berdasarkan kekuatan otonom dari kelompok-kelompok perwakilan kepentingan itu sendiri, seperti pada model pemerintahan pluralis. Akan tetapi, berdasarkan kepentingan



dan menciptakan apa yang dinamakan korporatisme masyarakat (*social corporatism*).

Kebalikannya, di negara kapitalis kurang berkembang, posisi borjuis ini sangat lemah. Ciri-cirinya adalah negara masih tergantung pada faktor eksternal hingga membatasi kemampuan negara untuk menjawab tuntutan kelas bawah. Negara melakukan peniadaan otonomi artikulasi tuntutan kelas bawah dalam sistem politik. Proses represif ini dinamakan korporatisme negara.<sup>2</sup>

Kelompok kepentingan borjuasi dalam konteks korporatisme menjalankan sektor ekonomi dan politik tertentu berkaitan erat dengan birokratis. Gagasan tentang birokratis ini bisa dimaknai sebagai alat yang efektif dan efisien untuk tujuan tertentu-ataupun alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dinilah hegemoni diperankan korporatisme negara melalui penciptaan opini, dan legislasi oleh kelompok intelektual-moral.

Kelompok borjuis yang menjadi bagian dari aktor hegemoni dan dimasukkan dalam kategori korporatisme negara, ada banyak di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah keberadaan Group Bakrie dengan pemilik yang sekaligus tokoh politisi senior Aburizal Bakrie. Pemilik Bakrie Group yang sekaligus ketua Setgab (sekertariat gabungan) ini menciptakan proses hegemonik melalui kasus lumpur lapindo yang tak berkesudahan, dengan cara memonopoli kelembagaan hukum, institusi politik dan media massa.

Kasus Lapindo terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, saat lumpur menyembur  
sistem dari ladang gas banjar baru milik Lapindo Brantas. Luapan lumpur

ini telah menenggelamkan area pemukiman, pertanian, industri, fasilitas pendidikan dan sarana publik sampai mencapai 470 hectare. Menurut Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional, kerugian langsung mencapai 7,3 trilyun dan potensi kerugian mencapai Rp 16,4 trilyun.<sup>3</sup>

Aburizal Bakrie sebagai pemilik saham PT. Lapindo Brantas mencuatkan dilema politik besar bagi pemerintahan Indonesia. Konflik kepentingan, inkonsistensi kebijakan sangat terasa dalam kasus lumpur lapindo. Setidaknya ada lima kelemahan utama yang kemudian ditangkap oleh pengamat politik *Eep Saiful Fatah* dari kasus lapindo yaitu (1) kelemahan dalam melakukan persilangan kepentingan; (2) kegagalan mengambil kebijakan (3) kegagalan menejemen pemerintahan (4) kegagalan memfungsikan hukum sebagai alat pertanggung jawaban publik (5) kegagalan memprioritaskan kepentingan utama.<sup>4</sup>

Empat tahun sudah kasus Lapindo terkatung-katung. Solusi yang diharapkan korban Lapindo atas tanggung jawab Group Bakrie terbentur dengan pengeluaran Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus lapindo oleh POLDA Jawa Timur pada tanggal 7 Agustus 2009 yang lalu dengan alasan tidak ada cukup bukti menyeret kasus tersebut ke perkara pidana.<sup>5</sup> Dampaknya adalah penundaan ganti rugi korban oleh PT.Minarak Lapindo Brantas. Bahkan Ketua LBH Masyarakat, *Taufik Basyari* menduga ada konspirasi terselubung antara

---

<sup>3</sup> Laporan Utama "Penyelesaian Lapindo", majalah Tempo edisi 8-14 Desember 2008, hal 101

<sup>4</sup> Eep Syaifullah Fatah "Betapa Lemahnya Pemerintah" dalam "Banjir Lumpur Banjir janji" 2007. Jakarta, KOMPAS

<sup>5</sup> "Satgas Mafia Hukum ke Polda SP3 Kasus Lapindo Disinyalir Permainan Makelar Kasus" diunduh pada tanggal 20 Agustus 2010 dari <<http://www.surabaya.pagi.com/index.php?p=detailberita&id=43633>>

pihak kepolisian dan kejaksaan dengan para pemilik modal (pihak Group Bakrie).<sup>6</sup>

Ambiguitas pemerintah ini tidak hanya terlihat dengan penerbitan SP3, tetapi bisa dilihat dalam keputusan presiden No 13 tahun 2006 dan No 14 tahun 2007. Dalam Kepres No 13 tahun 2006, disebutkan bahwasanya pemerintahan membebankan seluruh kerugian akibat lumpur Lapindo kepada pihak PT. Lapindo Brantas; dengan kata lain wacana talangan yang dilempar DPR tertutup sudah, sebagaimana status lumpur Lapindo sebagai bencana nasional.<sup>7</sup> Namun ada yang berubah pada Perpres No 14 tahun 2007, ganti rugi ini berubah menjadi akad jual-beli dan tanggung jawabnya tidak semata-mata ditanggungkan kepada PT. Minarak Lapindo, akan tetapi juga pada APBN. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan dana dari APBN untuk korban lumpur lapindo.<sup>8</sup> Revisi Kepres yang kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran Surat penghentian penyelidikan (SP3) ini adalah gambaran nyata ketidaktegasan dan inkosistensi pemerintah yang diakibatkan intervensi Group Bakrie.

Proses perubahan revisi dari kepres ke Perpres hingga pengeluaran SP3; merupakan bukti dari kegagalan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. *Eko Pujiono*, seorang Dosen Hukum bahkan menilai bahwa tanggung jawab kasus lapindo bisa ditelaah dengan mengaudit secara hukum kasus tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengelolaan

---

<sup>6</sup> Dianing sari, Tempo Interaktif 13 Agustus 2009, "SP3 Kasus Lapindo Dimanfaatkan Minarak Tunda Ganti Rugi" diunduh tanggal 20 Agustus 2010

<sup>7</sup> Sri Hartanti/khairini "Pemerintah Jangan Ambil resiko Lagi" dalam "Banjir Lumpur Banjir janji" 2007, Jakarta, KOMPAS.

Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan UU No 23 tahun 2007 ini, Eko Pujiono menilai bahwa pencemar yang bertanggung jawab mutlak atas kejadian ini adalah pihak Lapindo Brantas.<sup>9</sup>

Senada, Advokat *Fredrik J Pinakunary* menilai bahwa tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Dengan kata lain, dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka hal ini menjadi cukup alasan untuk menuntut pertanggungjawaban daripadanya. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana mutlak tepat untuk diberlakukan kepada pihak lapindo yang telah melakukan kejahatan sosial karena telah mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerugian, dan penderitaan yang berdampak luas pada masyarakat.

Dari semua bukti yang ada, penelitian ilmuwan dan pendapat para pengamat politik juga lingkungan; kasus lumpur lapindo sebenarnya sudah sangat jelas titik terang pelaku yang harus bertanggung jawab, yaitu pihak Lapindo Brantas. Tetapi sudah 4 tahun lebih kasus Lapindo masih terkatung-katung dengan ganti rugi yang belum semua tuntas. Ada hegemoni pihak group Bakrie dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie sehingga terjadi inkonsistensi maupun ketidaktegasan pemerintah dalam menanggulangi Kasus Lapindo. Pola hegemoni inilah yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat tema tulisan ini melalui judul ” *Hegemoni Korporatisme Negara terhadap Rakyat (Studi Kasus: Keterlibatan Interest Group Bakri dalam Penanggulangan lumpur Lapindo)*.

---

<sup>9</sup> Eko Pujiono, “Mencari Keadilan: Kasus Sidangis” dalam “Baniir Lumpur Baniir

## **B. Rumusan masalah**

*"Bagaimanakah pola hegemoni korporatisme negara yang dilakukan interest Group Bakrie dalam penanggulangan Kasus lumpur Lapindo?"*

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dalam bentuk elaborasi wacana dalam ruang lingkup politik Indonesia yang telah melewati dinamika reformasi. Konsep Hegemoni yang dipopulerkan oleh Gramsci bisa dijadikan alat analisa untuk memahami fenomena yang terjadi di Indonesia. Keberadaan Politisi Aburizal bakrie dengan group Bakrie nya menjadi hal yang sangat menarik untuk dianalisa, karena itu penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan jenjang sarjana strata-1
2. Sebagai usaha mengembangkan kajian mengenai konsep hegemoni dan korporatisme dalam study ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan dinamika pemerintahan di Indonesia dewasa ini.
3. Untuk mengukur kekuatan interest Group Bakrie
4. Untuk mengetahui Dampak hegemoni Bakrie pada Kasus lumpur Lapindo
5. Untuk menganalisa pola penyebaran hegemoni Bakrie pada Kasus lumpur Lapindo

## **D. Kerangka Dasar Teori**

Dalam mengkaji permasalahan diatas, pada dasarnya penulis dapat mengemukakan teori-teori yang ada relevansinya dengan ilmu pemerintahan



khususnya mengenai bedah pemikir besar asal Italia; Antonio Gramsci. Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang dipergunakan di dalam melakukan penelitian sehingga menjadi jelas, sistematis, ilmiah. Berbagai teori yang digunakan penulis karena dianggap relevan dengan studi kasus yang diambil adalah :

### **1. Teori Hegemoni**

Gagasan hegemoni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1885 oleh para marxis Rusia; terutama oleh Plakhanov pada tahun 1883-1883. Gagasan ini dikembangkan sebagai bagian dari startegi untuk menumbangkan rezim Tsarisme.

<sup>10</sup> Istilah tersebut menunjukkan kepemimpinan hegemoni yang harus dibentuk oleh kaum proletar dan wakil-wakil politiknya; dalam suatu aliansi dengan kelompok lainnya termasuk beberapa kritikus borjuis, petani dan intelek yang berusaha mengakhiri negara polis Tsaris.

Pada perkembangan berikutnya; Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat-masyarakat kapitalis diorganisasi dalam masa lalu dan masa kini. Gramsci menjelaskan bahwa di Prancis setelah revolusi 1789 kaum borjuis juga telah berkuasa secara hegemonik. Sebaliknya kaum bourjuis Italia dengan basis Piedmont gagal menerapkan hegemoni di Italia dan oleh karena itu Italia tetap rentan terhadap orang-orang fasis karena Negara tersebut tidak berdasarkan kepemimpinan hegemonik oleh kaum bojuis dalam masyarakat sipil atau negara.

Gramsci adalah seorang marxis. Meski beberapa narasumber menyebutkan bahwa dia mengkhianati marxisme orthodox karena menempatkan *civil society* bukan di wilayah basis/struktur melainkan di supratruktur. Civil society versi Gramsci menyebutkan bahwasanya Negara terdiri dari hubungan dua kelas besar yaitu pemodal dan buruh. Gramsci menyorot hegemoni dalam Negara ini dengan pandangan bahwa suatu kelas atau kelompok bisa menjadi hegemoni jika mampu melawati korporasinya dan berhasil menyatukan kepentingan kelas dan kekuatan sosial lain dengan kepentingan sendiri dan berhasil menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial utama untuk membangun bangsa. Konsepnya tentang hegemoni dan kaitannya dengan pemikiran mengenai civil society serta pandangannya tentang Neo-Liberalisme menjadi wacana yang dominan jika ditarik pada berbagai peristiwa dan wacana yang berkembang di Indonesia dewasa ini:

Ketika menyerang Marxisme ortodok dengan penekanan pentingnya tindakan manusia, ini dianggap sebagai pandangan yang revolusioner. Bagi Gramsci ideologi bukan hanya kekuatan material tetapi juga kekuatan politik. Ini berarti ideologi tidak hanya berfungsi sebagai pembebasan kelas pekerja dari eksploitasi ekonomi kapitalis tetapi juga untuk membebaskan masyarakat dari kesadaran kontradiktif, yaitu kecenderungan massa untuk meninggalkan massa lalu secara psikologis.<sup>11</sup>

Titik Awal Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjelaskan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara

kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam beberapa paragraf dari karya *Prison Notebooks*, Gramsci menggunakan kata *derisione* (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominaze* (dominasi).<sup>12</sup>

Penggunaan kata hegemoni yang digunakan oleh Gramsci harus dibedakan dari makna asalnya dalam Bahasa Yunani, yaitu penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Konsep hegemoni banyak digunakan para sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Hegemoni bisa juga didefinisikan sebagai dominasi kelompok terhadap kelompok lainnya dengan atau tanpa kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok lain yang didominasi diterima dengan sukarela. Nilai-nilai ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan pihak dominan dengan sedemikian rupa sehingga yang didominasi tetap diam dan patuh terhadap kepemimpinan kelompok penguasa.

Bagi Gramsci, masalah pokok yang berkaitan dengan Negara adalah watak kekuasaan yang dilaksanakan oleh kelas penguasa terhadap kelas yang lainnya. Negara tidak akan bisa difahami jika belum memahami apa yang disebut masyarakat sipil. Adapun yang dimaksud oleh Gramsci dengan masyarakat sipil adalah organisasi swasta (*private*) seperti gereja, serikat dagang, sekolah dsb.

---

<sup>12</sup> Bebersiman, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Insist press, 2004, hal 20

Semua organisasi yang kemudian membentuk masyarakat sipil ini merupakan hasil dari jaringan kerja dan praktik-praktik dan hubungannya yang bersifat kompleks, termasuk pertentangan antara dua kelas utama yaitu pemodal dan pekerja. Wilayah masyarakat sipil adalah wilayah di mana pemilik modal, pekerja dan kelompok lain terlibat dalam perjuangan politik dan tempat dimana partai politik, serikat dagang maupun lembaga keagamaan dan organisasi akan muncul. Jadi dalam konteks masyarakat sipil lah, hegemoni antara dua kelas utama akan muncul.

Untuk hubungan yang koersif, Gramsci menggunakan istilah masyarakat politik yang terwujud dalam berbagai lembaga Negara-angkatan bersenjata, polisi, penegak hukum dan penjara, bersama dengan semua administrasi yang mengurus masalah pajak, keuangan, dll. Bagi Gramsci, aktifitas Negara bukan hanya bersifat koersif, tetapi aparatur Negara ini berperan penting dalam membangun kesepakatan yang disebut 'peran edukatif Negara/format Negara'.<sup>13</sup>

Setelah jelas mengenai konsep masyarakat sipil, maka Gramsci mengemukakan proposisinya, sebagaimana halnya aparat pemerintah adalah instrumen yang bersifat privat. Bagi Gramsci, negara merupakan suatu kompleksitas dari aktifitas praktis dan teoretis di mana kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya tetapi juga memperoleh persetujuan dari kelompok lainnya yang berada di bawah kekuasaannya. Ini berarti Negara dipandang sebagai

masyarakat sipil di tambah masyarakat politik, dengan kata lainnya hegemoni yang dilindungi tameng koersif.<sup>14</sup>

Kelas hegemoni menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas yang ada dibawahnya disamping kekuasaan Negara yang menjalankan dimensinya dalam Negara. Kekuasaan ini tersebar dalam masyarakat sipil dan menjelma dalam aparat koersif Negara. Implikasinya adalah akan terdapat dominasi lokal, regional, rasial, birokratis serta bentuk dominasi lainnya dimana kekuasaan tertentu.

## **2. Teori Negara (state)**

Banyak orang yang sulit mengajukan pendapat atau memberikan definisi mengenai negara. Sebagian hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang demikian negara merupakan suatu abstraksi. Namun meskipun begitu negara memiliki unsur-unsur umum sebagai berikut: seperti wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan.<sup>15</sup> Konsep negara ini akan sangat berkaitan erat dengan konsep hegemoni, terutama dalam penyebaran kekuasaan. Untuk memahami keterkaitan antara negara dan hegemoni, maka diperlukan pandangan yang komprehensif mengenai negara.

Hal yang paling hakiki bagi setiap negara adalah rakyat. Rakyat adalah totalitas dari orang-orang yang membentuk negara. Negara sebagai suatu badan politik lokal mengandaikan suatu wilayah khusus sebagai basis spesial dari negara. Untuk menjadikan negara sebagai organisasi sempurna, maka harus dibentuk alat-alat negara yang berbeda dengan pengemban otoritas negara yang sah. Bagaimanapun juga bukanlah otoritas negara atau mereka yang

---

<sup>14</sup> Ibid hal 107

menjalankannya yang menentukan negara. Sebaliknya, negara menentukan alat-alatnya termasuk pejabat tertinggi negara.<sup>16</sup>

Negara sebagian, terdiri dari lembaga-lembaga yang memerintah, tetapi negara dan pemerintah tidaklah sinonim. Negara, dengan mengutip Burke, adalah suatu gagasan yang ada sepanjang masa, bagitupun ciri-cirinya diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama, masing-masing ditandai oleh rangkaian krisis dan keberhasilannya. Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah.

Negara tidak pula sinonim dengan masyarakat atau bangsa. Terutama bagi negara yang mempertahankan nilai-nilai liberalisme klasik, masyarakat dan bangsa mengandung konotasi rakyat, kebudayaan, tradisi, dan semua negara yang mempertahankan eksistensi sosial kolektif yang abadi yang mempertahankan perubahan-perubahan dipermukaan sosiologi massa, psikologi umum, konstitusi tertulis, lembaga formal, personal dan kebijaksanaannya.<sup>17</sup>

Ada banyak teori yang menjelaskan mengenai kemunculan negara, mulai yang melihatnya dari sifat ketuhanan, hukum alam, perjanjian masyarakat hingga teori kekuasaan. Semua teori ini berkembang dari waktu ke waktu hingga pendefinisian atas teori negara, tidak bisa dihomogenisasikan.

---

<sup>16</sup> Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, 2002, Jakarta, Gramedia, hal 602

<sup>17</sup> *Journal of Islamic Studies*, 2006, 21(1), 1-10. <http://www.ijis.or.id>

## **2.1 Teori Hukum Alam**

Para penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus dan Thomas Aquino. Pada zaman Yunani Kuno; Aristoteles (384-322) dalam bukunya *politica* merumuskan pengertian negara. Saat itu, polis berarti negara, kota yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara, dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Sedangkan Plato, guru Aristoteles menilai bahwa negara timbul karena ada keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang mendorong mereka untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh dari bentuk negara ini adalah Athena dan Sparta yang mengenal sistem pemerintahan langsung. Sedangkan Thomas Aquino dan Agustinus mendefinisikan negara sebagai suatu keharusan yang harus sesuai dengan cita-cita agama di mana untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan dengan memberikan tampuk kepemimpinan berdasarkan kekuasaan Tuhan.<sup>18</sup>

## **2.2 Teori Perjanjian Masyarakat**

Teori perjanjian sosial yang terkenal digulirkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679), John Locke (1632-1704), dan JJ Rousseau (1772-1778). Para tokoh ini mencetuskan teori sebagai reaksi zaman pencerahan melawan kekuasaan mutlak gereja pada setiap kehidupan. Sebelumnya, Gereja merupakan pusat kebenaran, dan berhak memberikan pengabsahan dalam hal pemerintahan. Hal utama dari teori perjanjian sosial adalah negara terbentuk dari manusia. Manusia pada dasarnya mendiami suatu negara secara alami dan mengatur segala

---

<sup>18</sup> F. L. L. ...  
18 F. L. L. ...  
18 F. L. L. ...

kelakuannya sesuai dengan lingkungan yang ada alias mengikuti hukum yang telah terbentuk oleh sifat alam.

Namun tidak ada seorangpun perantara dimasa itu maju untuk membentuk suatu hukum secara sifat dasar. Lazimnya manusia disuatu masa akan menghadapi beberapa permasalahan dalam sifat alami negara, dari situ pula mereka berpikir untuk menyelesaikan bahkan ada juga yang meninggalkannya, dari sinilah mereka bergabung dalam suatu persetujuan dan mulai menciptakan negara.<sup>19</sup> Untuk menjamin adanya keseimbangan antara masyarakat dan Negara maka dibentuklah trias politica yang memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislative dan yudikatif yang dicetuskan oleh Montesque.

Teori negara ini disebut juga dengan pandangan liberalisme karena para tokoh tersebut membawa semangat sekularisasi, pemisahan antara negara dan agama. Pada masa tersebut peran agama melemah dan orang kembali mendasarkan hidupnya pada peran ilmu yang rasional. Dampak dari perkembangan ini adalah pada proses legitimasi kekuasaan negara. Filsafat negara liberal ini mencerminkan kepentingan kaum borjuasi agar menyediakan ruang bagi kebebasan berusaha dan untuk mengakumulasi modal. Negara model seperti ini juga dijuluki sebagai "Negara Penjaga malam" karena lebih berperan melindungi hak milik borjuasi, dan menempatkan kaum miskin dan lemah sebagai warga kelas dua.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Tasar Karimudin, Teori asal Usul Negara II dalam



### **2.3 Teori Kekuasaan**

Dalam konteks kekuasaan, negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan. Secara keseluruhan, teori negara (state) dari perspektif kekuasaan inilah yang relevan untuk dijadikan bahan teori bagi penulis. Beberapa tokoh yang menganggap negara adalah organisasi kekuasaan adalah Engels, Karl Marx, Max Weber, dan Gramsci. Menurut tokoh-tokoh ini, negara dapat memaksakan anggotanya dengan mematuhi peraturan yang diciptakan oleh negara baik secara militer maupun ideologis. Negara adalah instrumen utama yang menjaga keberlangsungan kedaulatan kelas-kelas pemilik modal sepanjang tiga tahap peradaban masyarakat, mulai dari peradaban perbudakan, feodalisme, sampai pada kapitalisme. Maka bentuk dominasi dari kelas pemilik modal melalui negara pun bisa bervariasi, mulai dari bentuk otokrasi sampai dengan demokrasi.

Menurut Engels, pusat mata rantai di dalam masyarakat beradab adalah negara, yang terbukti telah menjadi negara kelas penguasa di seluruh periode perkembangannya. Bahkan menurut Engels, hampir semua kasus negara lebih mendasar berkembang menjadi mesin untuk terus menekan kelas yang ditindas dan dihisap.<sup>21</sup>

Negara baru muncul pasca perang dunia ke II, setelah membebaskan diri dari kekuasaan kolonial, ini terjadi di benua Asia dan Afrika karena di Amerika latin gerakan kemerdekaan sudah gencar dilakukan. Anggapan bagi negara yang baru merdeka ini adalah, kemampuan mereka untuk membangun negara dan mengolah hasil sumber daya alam yang semula dikuasai oleh bangsa kolonial,

---

<sup>21</sup> Engels dan Lenin, *Das Kapital*, Kanisius, Pribadi, dan Negara, 2004, Jakarta.

sekarang bisa mutlak menjadi milik negara. Untuk itu, negara yang baru merdeka ini menjadikan negara kapitalis seperti Amerika, Inggris, Jepang dll sebagai model pembangunan yang patut dicontoh.<sup>22</sup>

Negara maju yang menjadi arah kiblat bagi negara yang baru berkembang ini adalah penganut paham kapitalisme, di mana negara memberikan ruang yang luas untuk para pemilik modal (wiraswata) dalam mengatur pasar. Kondisi kondusif pada sektor ekonomi yang liberal ini adalah tiadanya campur tangan negara untuk mengurus pasar, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Hukum yang berlaku bagi ekonomi kapitalistik ini meniscayakan prinsip kompetisi pasar bebas.

Negara kapitalis ini menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh kepada perilaku ekonomi. Pertama, negara menetapkan serangkaian target-target ekonomi, misal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan full employment, mengusahakan stabilitas harga, menjaga supaya neraca pembayaran tetap bagus di dalam arena perdagangan internasional. Kedua, negara menetapkan kebijakan moneter. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol money suplay agar tidak terjadi inflasi tinggi. Banyak negara juga menetapkan syarat yang harus ditaati oleh bank-bank dan institusi keuangan lain dalam meberikan hutangnya pada kreditor swasta. Ketiga, menetapkan kebijakan pendapatan. Tujuannya yaitu untuk pemeratakan pendapatan. Keempat, kebijakan negara yang disebut industrial policy yang akan berpengaruh langsung terhadap industri.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Arif Budiman, 2006, *Kebebasan, Negara, Pembangunan kumpulan tulisan 1965-2005*, Jakarta, Pustaka Alfabet hal 41

<sup>23</sup> Mubandha "Emak Negara" *Online*, Modifikasi: 2022, Yogyakarta: Cendekia Pustaka

Implikasi daripada ekonomi kapitalistik adalah minimnya peran negara, sehingga peluang untuk bisa membuka lahan bisnis yang profit hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar. Orang-orang yang tidak memiliki modal ini, biasanya menjadi tenaga kerja bagi para pemilik modal. Tenaga kerja yang tidak berimbang dengan kepemilikan alat produksi mengakibatkan tenaga kerja dinilai sangat murah. Sketsa ini mengakibatkan kondisi ekstrem di mana 'orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin'.<sup>24</sup>

Ramalan Marx, bahwa kaum miskin akan bersatu melawan para pemilik modal yang bersaing satu sama lainnya ternyata tidak terbukti karena ekonomi kapitalistik senantiasa mereformasi dirinya. Sistem ekonomi kapitalis ini memperbaiki diri agar kontradiksi-kontradiksi yang ditimbulkan antara kelas pekerja dengan pemilik modal bisa dapat diredam, dan untuk itu hadirilah 'negara'. Karena itulah, Weber bahkan berpendapat, bahwasanya negara adalah institusi yang memiliki monopoli untuk menggunakan kekerasan dengan aspek militer maupun polisi dari negara.

Selain fungsi militer tersebut, negara juga memiliki fungsi lainnya yaitu fungsi ekonomi dan ideologis. Dalam konteks ekonomi, negara bertugas mensejahterakan rakyatnya, dan mengurangi angka kemiskinan. Untuk itulah negara memberikan lahan yang luas untuk para pemilik modal dalam mengembangkan bisnisnya agar nanti pajak yang dihasilkan bisa diberikan kepada kaum miskin. Sedangkan untuk konteks ideologis, negara menyebarkan faham

bahwasanya kebebasan individu lebih baik daripada keadilan sosial. Ideologi ini disebarakan melalui sekolah, lembaga keagamaan, partai politik dsb. <sup>25</sup>Secara ideologi, pimpinan negara terdiri atas orang-orang yang sama ideologinya dengan golongan kuat dan diuntungkan oleh sistem masyarakat tersebut. Secara struktural berarti kekuatan negara tersebut didasarkan pada struktur sosial ekonomi dari sistem yang dianut masyarakat tersebut.

Bagi marxisme, negara adalah alat bagi kelas yang berkuasa untuk melakukan penindasan kepada warga masyarakat. Sebagai alat dari kaum borjuis dalam sistem kapitalis, kekuasaan negara diabdikan untuk kepentingan kelas ini, seperti halnya negara yang mengabdikan kekuasaannya kepada kaum bangsawan dalam sistem feodal.

Kaum marxis beranggapan bahwa negara merupakan alat dari kelas yang berkuasa untuk melakukan penindasan warga masyarakat. Dalam sebuah masyarakat feodal, kelas bangsawanlah yang menguasai negara, dalam masyarakat kapitalis kelas pemilik modal, dan seterusnya. Karena itu, di dalam masyarakat manapun, selalu terjadi ketidakadilan antar kelas. Sampai tercipta masyarakat komunis.<sup>26</sup>

Dalam masyarakat komunis, semua orang memiliki hak politik dan hak ekonomi yang sama. Hak milik individu atas alat produksi dihapuskan. Alat produksi dikuasai bersama secara kolektif oleh semua warga masyarakat. Dengan demikian, kekayaan setiap orang dapat dikontrol oleh negara. Kekayaan setiap

---

<sup>25</sup> Ibid hal 43

<sup>26</sup> Ibid hal 43

orang relatif sama; dengan adanya persamaan kekayaan ini orang tidak bisa menggunakan kekayaan material sebagai basis politiknya. Negara tidak bisa lagi dikendalikan oleh kelas pemilik modal seperti dalam sistem kapitalis.

Bagi kaum Marxis, negara yang ada dalam masyarakat kapitalis tidak memiliki keabsahan untuk memerintah kaum buruh dan kelas tertindas lainnya karena negara tersebut pada dasarnya hanya melayani kelas yang menguasai modal. Demikian pula negara dalam konteks masyarakat feodal. Oleh karena itu upaya untuk membuat negara menjadi demokratis di mana kedaulatan ada ditangan rakyat saja, dirasa masih belum cukup. Dalam masyarakat berkelas, demokrasi hanya menguntungkan kelas yang dominan. Untuk memperoleh demokrasi atau kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, masyarakat berkelas harus dihapuskan. Dan ini hanya bisa terjadi di dalam masyarakat sosialis komunis. Karena itu, bagi marxisme, kedaulatan rakyat adalah kedaulatan dari masyarakat yang tak berkelas. Hal ini didasarkan pada teori bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan kelas. Negara hanya berupa manifestasi dari pertentangan yang terus menerus ini; sampai tercipta masyarakat komunis di mana pertentangan kelas tidak ada lagi.<sup>27</sup>

Dengan melihat konteks negara dalam perspektif teori kekuasaan, maka negara dalam hal ini tak lebih sebagai alat penindas karena ditunggangi oleh pihak Bakrie, hal tersebut ditopang oleh fakta penetapan kebijakan yang lebih menguntungkan pihak pemilik modal yang dalam hal ini adalah Grup Bakrie

### 3. Teori Korporatisme

Pembicaraan korporatisme bukanlah hal yang baru bagi perkembangan bentuk pemerintahan. Korporatisme baru mendapat perhatian para ahli pada dekade 1970-an untuk memahami masalah sosial-politik dan ekonomi negara Amerika latin.

Korporatisme memiliki banyak bentuk pengertian, diantaranya sebagai bentuk pemerintahan dengan penekanan pada sistem perwakilan kepentingan. Menurut *Alan K. Schriber*, korporatisme adalah bentuk pemerintahan atau sistem politik yang membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang dibatasi (terbatas) atau yang di organisir (terorganisir). Kelompok-kelompok kepentingan tersebut dikelola berdasarkan sektor-sektor vertikal yang memotong struktur-struktur horizontal atau kelas. Wakil-wakil sektor dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut berfungsi secara bersama membentuk suatu pemerintahan elit yang koheren.<sup>28</sup>

Sejarah korporatisme pada perkembangannya bisa dipelajari dari tradisi mapan dan berpengaruh di Spanyol dan Portugal. Dalam menjalankan korporatisme negara sebagai dasar analisa, *Stepan* secara sederhana membedakannya dalam dua jenis. Pembagian ini dilandasi oleh suatu upaya untuk menganalisa dinamika korporatisme negara secara lebih tajam sekaligus dapat menjawab kemungkinan berhasil atau gagalnya elit negara untuk membangun suatu bentuk pemerintahan dengan karakteristik korporatis. Pembagian lebih lanjut ini diasosiasikan dengan gagasan tentang perwakilan dan

persekutuan elit dalam pembangunan negara, dalam suatu kerangka kerja korporatis. Jenis kebijaksanaan yang pertama adalah korporatisme inklusif, dan kedua adalah korporatisme eksklusif.

Korporatisme inklusif ditandai dengan elit negara yang mencoba membentuk keseimbangan baru negara dengan masyarakat lewat kebijaksanaan dengan menonjolkan kedudukan kelas pekerja guna mewujudkan suatu model politik dan ekonomi baru. Dalam korporatisme inklusif mitra negara didominasi oleh borjuis nasional, kelompok kelas buruh dan petani baru yang telah diserap.

Korporatisme eksklusif ditandai dengan elit negara mencoba membentuk keseimbangan baru negara dengan masyarakat yang menekan keaktifan kelas pekerja. Mitra negara dalam bentuk korporatisme eksklusif adalah borjuis internasional dan kaum teknokrat dan birokrat. Suatu tipe yang dikenal juga dengan sebutan rezim birokratik/otoriterisme.

Keduanya merupakan bagian dari korporatisme negara yang merujuk pada orientasi kebijakan dominan yang diambil oleh elit negara. Baik inklusif maupun eksklusif, pada dasarnya merupakan jawaban elit akan persepsi terhadap krisis partisipasi dan kontrol.

Menurut *Schmitter*, bentuk pemerintahan korporatisme ada dua subtype yaitu korporatisme masyarakat (*societal corporatism*) dan korporatisme negara (*state corporatism*). Korporatisme masyarakat dicirikan dengan suatu sistem perwakilan atau asosiasi kepentingan yang relatif otonom, di mana aktivitas-aktivitas dan dukungan terhadap pemerintah (negara) merupakan sumber legitimasi politik yang utama. Adapun ciri korporatisme negara adalah dengan

penetrasi dan pengawasan (kontrol) pemerintah terhadap perwakilan atau asosiasi kepentingan.<sup>29</sup>

Menurut *Schmitter*, korporatisme adalah jawaban terhadap kebutuhan kapitalisme untuk menciptakan suatu rencana atau aransemen politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Kebutuhan ideologi kapitalisme berbeda beda menurut tahapan perkembangan dan konteks internasional. Pada negara kapitalis maju kebutuhan utamanya adalah rezim (sistem politik yang stabil) di dominasi kelas borjuis. Dengan kelas borjuis yang mapan dan kuat akan mampu menghadapi kompetisi dalam pertarungan ekonomi internasional dengan cara asosiasi dan mengambungkan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat kelas bawah ke dalam proses tersebut secara jauh. Dengan meletakkan kelas pekerja ke dalam sistem politik tersebut dan sekaligus memberikan mereka keuntungan material; kelas kapitalis dapat menjamin keberlangsungan pola produksi ekonomi mereka. Proses ini pada gilirannya akan mengakibatkan merosotnya politik pluralis dan menimbulkan apa yang dinamakan korporatisme masyarakat.

Pada negara kapitalis kurang berkembang atau wilayah dunia ketiga posisi kelas borjuis sangat lemah. Akibatnya akan terjadi pembatasan kemampuan negara untuk memenuhi tuntutan kelas bawah. Oleh karena itu negara mempertimbangkannya sebagai suatu kebutuhan dijalankannya perdamaian sosial, tidak melalui kooptasi atau pengabungan kelas bawah kedalam sistem politik. Proses represif dan meniadakan kelas bawah ini menghasilkan apa yang dinamakan korporatisme negara.



Menurut teori korporatisme diatas, dapat dianalisa bahwa interest group Bakrie tergolong kedalam korporatisme negara. Hal ini ditandai dengan<sup>30</sup>:

1. posisi pemerintah tertinggi biasanya dipegang oleh kelompok setelah melalui jenjang karir yang berhasil dalam organisasi yang terbirokratis secara ketat.

2. peniadaan politik, yang bertujuan untuk menutup jalur akses politik dari sektor populer dan aliansi-aliansinya sehingga mendeaktifisasi mereka secara kolektif.

#### **4. Teori Kelompok Kepentingan/*Interest Groups***

Teori berikutnya adalah teori kelompok kepentingan/interest group, yaitu individu-individu yang menggabungkan diri dan bergerak berdasarkan kepentingan dalam ranah sosial dan politik.<sup>31</sup> Definisi lain dari kelompok-kelompok berkepentingan merupakan organisasi-organisasi yang memiliki sebagian otonomi dari pemerintah atau partai politik dan mencoba mempengaruhi kebijakan publik' (Wilson, 1990).<sup>32</sup>

Mereka dinilai sebagai organisasi formal dan karenanya dapat dibedakan dari gerakan-gerakan sosial. Kepentingan merupakan basis aktivitas kelompok; kepentinganlah yang mengorganisasikan kelompok-kelompok, dalam sistem sosial dan politik akan terus mengartikulasikan kepentingannya sampai

---

<sup>30</sup> Nur Iman Subono.,op.cit hal 79

<sup>31</sup> S.P Varma, *Teori Politik Modern*, , terj. Yohanes Kristiarto dkk, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 2007, hal. 227

kepentingan tersebut menemukan ekspresinya. Bentuk artikulasi kepentingan paling umum dalam sistem politik adalah pengajuan permohonan kepada dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau pembuat kebijakan lainnya.

Seperti halnya partai politik, kelompok ini mendiami ruang antara masyarakat dan negara, membantu menghubungkan keduanya. Namun di mana partai politik berhasrat untuk menjadi pemerintah, *interest group* hanya mencoba mempengaruhinya. Ringkasnya, *interest group* tidak menentang pemilihan, bahkan, mereka secara tipikal mengadopsi pendekatan pragmatis dan seringkali tidak menonjol dalam berurusan dengan struktur kekuasaan apapun yang menghadang mereka. Meskipun banyak *interest group* menjalankan kerja-kerja mereka secara diam untuk mempengaruhi pemerintah, namun aktifitas mereka menyeluruh dalam menegakkan demokrasi. Staff mereka juga bernegosiasi dengan para birokrat mengenai detail-detail regulasi yang diajukan, menekankan kasus mereka di komite sidang perkara legislasi dan berupaya mempengaruhi media untuk menyokong posisi mereka. Akan tetapi pada rezim autoritarian, kepentingan di artikulasikan dalam sebuah gaya yang kurang terpublik, lebih sporadis dan terkadang lebih korup. Kepentingan masih diekspresikan pada pemerintah namun kerap kali melalui perusahaan individual atau individu yang berpengaruh ketimbang kelompok.

#### **4.1 Pengkategorian Kelompok Kepentingan**

Pengkategorian kelompok kepentingan bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu kelompok aktif dan kelompok pasif. Kelompok aktif adalah kelompok yang berusaha mempengaruhi pemerintah melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok pasif adalah kelompok yang tidak berusaha mempengaruhi pemerintah.

yang menyuarakan isu-isu penting anggota mereka, misalnya saja serikat dagang; organisasi pekerja, badan industri dan asosiasi profesional seperti pengacara atau ilmuwan. Terkadang disebut kelompok sektorial atau fungsional, badan-badan perlindungan ini berusaha mempengaruhi pemerintah. Mereka memiliki validasi yang membantu mereka mencapai sasaran mereka. Para pekerja dapat melakukan 'pukulan' para praktisi medis dapat menolak bekerja sama dengan rumusan kebijakan baru. Kelompok protektif mencari keuntungan tertentu bagi anggota mereka dan status orang dalam dengan departemen pemerintah terkait karena jelas mereka mewakili kepentingan pekerjaan, asosiasi protektif seringkali menjadi yang paling berpengaruh atas semua interest group. Mereka dibentuk dengan baik; memiliki hubungan yang adekuat dan memiliki sumber daya yang memadai.

Kelompok kedua adalah kelompok promotor di mana peranannya sangat signifikan dalam menyokong demokrasi dan diakui oleh pemerintah. Bahkan meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok promotor sejak 1960an, terutama di US, membentuk tren-tren utama dalam politik interest group. Relatif pentingnya kelompok-kelompok protektif dan promotor banyak mengungkap sifat politik dan pembuatan kebijakan di negara manapun. Di US, secara signifikan, mempromosikan kepentingan publik sebagian besar merupakan tanggung jawab ranah privat; kelompok promotor. Misalnya saja, Common Cause mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai organisasi warga pelobi non-partisan, nirlaba yang mendedakan ketidakadilan, ketidakadilan dan ketidakadilan.

Perbedaannya bisa lebih jelas dari tabel berikut ini<sup>34</sup>:

**Tabel 1.1 Perbedaan Kelompok Kepentingan**

<b>Kategori</b>	<b>Protektif Group</b>	<b>Promotor Group</b>
<b>Tujuan</b>	Grup yang membela suatu kepentingan	Kelompok yang mempromosikan suatu kasus
<b>Keanggotaan</b>	Tertutup-keanggotaan terbatas	Terbuka-siapa saja bisa bergabung
<b>Status</b>	Sering berkonsultasi dengan pemerintah dan aktif mencari peran.	Dari luar-Tidak terlalu sering konsultasi dengan pemerintah tapi membentuk opini di media
<b>Manfaat</b>	Selektif-hanya keanggotaan yang mendapat manfaat	Kolektif-manfaat bisa dirasakan oleh anggota dan non anggota
<b>Focus</b>	Kelompok nasional-untuk mempengaruhi pemerintah nasional	Kelompok internasional-kelompok yang mempengaruhi opini publik global

Berdasarkan kategori diatas, maka penulis mengklasifikasikan group Bakrie sebagai kelompok protektif. Dalam mewujudkan hegemoninya, group

<sup>34</sup> Ibid hal 168

Bakrie menjadi bagian dari kelompok kepentingan yang memiliki andil yang besar dalam proses lahirnya suatu kebijakan.

Sedangkan menurut *Gabriel A. Almond*, seorang ilmuan politik yang menilai bahwa kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat menduduki posisi penting dalam setiap sistem politik.<sup>35</sup> Kemudian Gabriel membagi kelompok kepentingan menjadi empat (4), yaitu:

a. Kelompok Anomik

Proses kelompok ini terbentuk secara spontan dan hanya sementara, kelompok anomik ini tidak memiliki nilai yang pasti sehingga sering tumpang tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional. Seperti: demonstrasi, tindak kekerasan, dan kerusuhan politik. Namun ketika pemimpin tidak cakap menanggapi perihal kelompok anomik ini, akan terjadi akumulasi kekecewaan dan pada kulminasinya memungkinkan munculnya seorang pemimpin baru. Selanjutnya Almond berpendapat bahwa, kita harus jeli melihat aksi politik yang bersifat anomik ini, dimungkinkan bila aksi tersebut telah direncanakan dengan matang dan terorganisir oleh kelompok kepentingan yang terorganisir.

b. Kelompok Non-Assosiasional

Hampir mirip dengan kelompok anomik, kelompok ini jarang yang terorganisir dan bersifat kadang kala. Kelompok ini bersifat keluarga dan

---

<sup>35</sup> Mochtar Mas'Oed & Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, cetakan VII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 52

keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan dengan tidak berpola atau kadang kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama/spiritual. Aspirasi kepentingan kelompok ini bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan sementara atas keadaan atau sistem; seperti kepentingan kelompok linguistik tertentu mengenai bahasa pengantar di sekolah, permintaan dari beberapa tuan tanah kepada birokrat dalam suatu klub sosial informal terhadap tarif hasil pertanian dan sebagainya.

e. **Kelompok Institusional**

Kelompok kepentingan ini sering kali didukung oleh birokrasi atau unit-unit sistem dalam suatu negara karena bersifat formal, kelompok institusional ini biasa berbentuk badan hukum maupun kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum tersebut, seperti fraksi-fraksi dalam lembaga legislatif, klik-klik perwira, departemen, dan klik-klik ideologis dalam sistem atau birokrasi. Dalam artikulasi kepentingannya kelompok ini biasa membawa kepentingannya sendiri atau kepentingan dari kelompok-kelompok lain dari masyarakat.

Almond menilai kelompok ini kuat dikarenakan basis organisasinya yang kuat dan merupakan sub-sub dari sistem dalam birokrasi.

d. **Kelompok Assosiasional**

Type kelompok assosiasional ini merupakan kelompok kepentingan yang khas yang menyatakan kepentingannya dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff profesional yang bekerja dalam suatu organisasi.

untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan: Seperti serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan pengusaha dan industrialis.

Strategi dan taktik kelompok asosiasional dalam mencapai tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat, dan keberadaan kelompok ini jelas Almond membatasi pengaruh kelompok kepentingan non-Assosiasional. Agar dalam mencapai kepentingannya atau tercapai tujuannya, kelompok kepentingan harus mampu mencapai dan berhubungan langsung dengan pembuat keputusan politik, kelompok kepentingan harus mampu menyusupi struktur keputusan politik dan mempengaruhi output kebijakan politik.

#### **4.2 Jalur Yang dimiliki Oleh Kelompok Kepentingan**

Ada beberapa cara komunikasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan kepada para pembuat kebijakan. Karakteristik ini ada yang berkaitan langsung kepada pemerintah; mempengaruhi opini publik dan pengaruh tidak langsung dari partai politik. Beberapa jalur yang digunakan ini adalah (a) pembahasan langsung dengan para pembuat kebijakan, (b) pengaruh tidak langsung dari partai politik (c) pengaruh tidak langsung media massa (d) para pelobby. Jalur akses inilah yang kemudian dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk menggoalkan isu yang dibawanya.

##### **a. Pembahasan langsung dengan pembuat kebijakan**

Hal utama sebagian besar interest group, terutama protektif, adalah mempengaruhi kebijakan publik. Sebagian besar aktifitas ini berfokus pada birokrasi. Legislatif dan pengadilan. Dalam menegakkan demokrasi birokrasi

adalah poin penekan utama. Interest group mengikuti kekuasaan dan dalam kantor pelayanan sipil inilah detail keputusan di susun. Sebagaimana dinyatakan oleh Matthews (1989),

*“Pentingnya birokrasi didorong oleh peran pembuatan kebijakan dan sang pembuat kebijakan, banyak keputusan rutin, tehnik dan kurang penting, yang merupakan perhatian utama bagi interest group, disusun oleh pelayan publik.”*

Kemampuan interest group berfokus pada susunan-susunan kecil karena sulit bagi mereka untuk mengontrol isu luas kebijakan, yang disusun oleh politikus yang terpilih. Namun pada detail, sebagian besar negara demokrasi mengikuti konvensi pembahasan dengan opini terorganisir melalui dewan atau komite konsultatif, seringkali ranah hukum yang membutuhkan konsultasi semacam itu. Lagipula, keahlian sesungguhnya seringkali terletak pada interest group ketimbang birokrasi, dan dari sudut pandang kementrian, kesepakatan yang dapat diterima bagi semua akan aman secara politik.

b. Pengaruh tidak langsung dari partai

Interest group dan partai politik keberadaannya dapat saling tumpang tindih karena keduanya merupakan perangkat di mana kekuatan sosial berupaya untuk mempengaruhi pemerintah. Misalkan Gerakan buruh Britania secara historis menilai sayap industrinya (serikat dagang) dan sayap politik (Partai Buruh) sebagai bagian gerakan tunggal yang mendorong kepentingan kelas pekerja. Dalam cara yang serupa, gerakan lingkungan telah memunculkan interest group promotor dan partai politik hijau.



Namun hubungan intim seperti itu antara kelompok-kelompok dan partai merupakan pengecualian. Sebagian besar interest group mencoba melakukan upaya langsung ketimbang mengembangkan hubungan dekat dengan partai politik.

Abu Rizal bakrie adalah ketua grup Bakrie sekaligus ketua umum Partai Golkar. Tentu saja hal ini akan saling berkaitan dan membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam pembuatan suatu kebijakan.

e. Pengaruh tidak langsung dari media massa

Media, radio dan televisi menyediakan sumber tambahan untuk interest group. Media ini sangat berperan penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam sistem politik di mana legislator adalah hal penting. Di US sebagian besar kelompok protektif telah belajar bahwa untuk membuat kongres terkesan mereka pertama-tama harus mempengaruhi publik. Karena itu kelompok-kelompok semacam itu menggunakan strategi ganda yaitu melalui publik dan Washington. Interest group, di negara demokrasi lainnya, mulai mengikutinya, dengan perlahan dan tidak pasti, kelompok protektif bermunculan dari birokrasi pinggiran memasuki pesona publisitas media.

d. Para pelobbi

Lobi (*lobby*) adalah istilah yang diambil dari *hall* (aula) atau lobi Rumah Rakyat Britania. Disini orang-orang dapat, dan masih melakukannya, mendekati anggota parlemen untuk menyuarakan isu mereka. Bisnis lobi sangatlah bersifat personal. Seorang legislator lebih mungkin menjawab telepon dari pelobi yang

mencermati legislator atau para birokrat sebelumnya yang dapat didekati. Melobi adalah mengenai apa yang anda ketahui.

Terdapat tiga alasan yang membuat profesi melobi menjadi semakin luas. Pertama; regulasi pemerintah terus bermunculan; seringkali berdampak langsung pada perusahaan, interest group dan serikat dagang. Kedua, kampanye hubungan publik menjadi semakin rumit, seringkali mencoba mempengaruhi akar rumput dan pemerintah dalam sebuah proyek yang terintegrasi. Penasehat profesional memiliki perencanaan mereka sendiri dan melakukan berbagai kampanye, yang menjadi terlalu kompleks bagi klien untuk mengelolanya secara langsung.

Ketiga, banyak perusahaan sekarang melakukan pendekatan secara langsung pada pemerintah, ketimbang melalui asosiasi dagang mereka. Perusahaan-perusahaan mendapati bahwa menggunakan perusahaan lobi untuk membantu mereka menghubungi badan-badan pemerintahan atas legislator memberikan hasil yang lebih cepat ketimbang bekerja melalui badan industri.

#### **4.3 Relasi Negara dengan Kelompok Kepentingan**

Dewasa ini banyak interest group yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Dalam sektor tertentu, diduga, pemimpin interest group dan pelayan sipil senior membentuk komunitas kecil mereka sendiri. Semua anggota mengetahui satu sama lain, menggunakan nama yang diajukan dan mencoba tidak mengecewakan pihak lain. Para partisipan mengembangkan kebiasaan berbagi kerja dan umumnya menduga tentang apa yang dapat diraih. Para aktor belajar untuk saling percaya dan menjabarkan tujuan dan kepentingan satu sama lain.

Ilmuwan politik Amerika menggunakan istilah "*iron triangle*" untuk mendeskripsikan bentuk khusus hubungan antara kelompok dan pemerintah di USA. Tiga titik segitiga adalah agensi atau departemen eksekutif, interest group dan komite kongres. Segitiga semacam itu menjadi praktek "menggaruk punggung" bersama. Komite menyediakan dana untuk agensi atau keuntungan anggota interest group. Karena itu Departemen Pertanian, komite relean alam Kongres dan kelompok petani akan berkonspirasi atas subsidi makanan yang lebih besar. Masing-masing pihak saling diuntungkan. Ini adalah permainan tanpa ada yang dikalahkan – kecuali untuk pembayar pajak yang jarang mengetahui apa yang sedang terjadi.<sup>36</sup> Segitiga ini juga disebut sub-pemerintahan, mengimplikasikan bahwa masing-masing segitiga membentuk pemerintahan kecil pada pihaknya, kebanyakan pembuat kebijakan independen di sektor lain. Efeknya adalah untuk memecah pembuatan kebijakan, menangkis sasaran politik mayoritas partai di Kongres atau bahkan presiden sendiri (Ripley dan Franklin, 1991).

##### **5. Teori Sistem Politik (David Easton)**

Sistem politik adalah sekumpulan struktur dan proses yang saling berhubungan dan berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi suatu masyarakat. Keluaran-keluaran (*output*) dari sistem politik merupakan alokasi-alokasi nilai secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif dari sistem dan alokasi-alokasi ini merupakan kebijakan publik.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid 172

<sup>37</sup> David Easton, *Teori dan Proses Politik*, Yogyakarta: Media Press, hal. 95

Sistem politik merupakan bentuk kegiatan politik yang melibatkan berbagai unsur dalam suatu Negara. Sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit, oleh karena itu ada input yang akan selalu diproses menjadi output untuk selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem itu berada.

Pendekatan sistem politik dimaksudkan untuk memberi penjelasan terhadap fenomena politik. Selain itu, sistem politik berfungsi dalam menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk; oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari sistem-sistem lain yang ada di masyarakat seperti sistem sosial, sistem ekonomi, dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik adalah abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) dari kondisi *real* fenomena perpolitikan di suatu masyarakat.

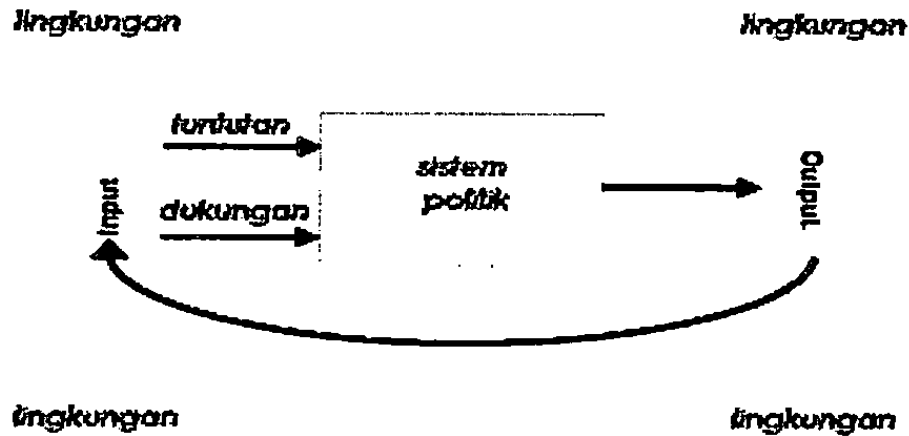
*David Easton*, seorang ilmuwan politik dalam mengkontruksi sistem politik demokratis, memberikan pandangannya bahwa sistem politik merupakan interaksi lima komponen. Yaitu: *konversi, ouput, feed back, dan lingkungan dalam sebuah diagram yang sistematis.*<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dia ambil dari <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/kerangka-kerja-sistem-politik-david.html> diunduh pada tanggal 5 September 2010

## 1.1 Skema Kerja Sistem Politik

### Skema Kerja Sistem Politik menurut David Easton



Model seperti diatas sangat lazim digunakan untuk menganalisa berbagai produk kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan.

Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif, dan ini hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai.

Ciri-ciri dari system politik adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. *Ciri identifikasi*

Untuk membedakan suatu sistem dari sistem sosial lainnya maka harus di identifikasikan dengan menggambarkan unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan unit itu dari unit-unit yang ada di luar sistem politik.

a: unit sistem politik

Adalah unsur yang membentuk sistem. Dalam sistem politik, unit-unit ini berwujud tindakan politik.

b. perbatasan

Beberapa poin penting berkenaan dengan berfungsinya sistem politik hanya dapat diketahui bila fakta dalam suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan birokrasi lain.

## 2. *Input dan Output*

Ada dua jenis input dalam sistem politik yaitu tuntutan dan dukungan. Sebagai tuntutan input ini dilakukan untuk memperoleh pemuasan melalui hubungan status di dalam masyarakat, tuntutan akan kekayaan bisa dipenuhi sebagian melalui sistem ekonomi, keinginan memiliki kekuasaan bisa diperoleh melalui pendidikan; pergaulan; organisasi buruh dan yang lain. Input berupa tuntutan saja tidak cukup memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan yang memajukan dan merintangai suatu sistem politik, tuntutan yang timbul di dalamnya dan keputusan yang dihasilkan. Input ini disebut

Output dalam suatu sistem politik adalah berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Salah satu cara utama untuk memperkuat ikatan antara anggota-anggota dengan sistem mereka adalah dengan menciptakan atau memberikan keputusan yang bisa memenuhi tuntutan dari anggotanya. Output-output, yang berwujud keputusan-keputusan politik merupakan pendorong yang khas bagi anggota suatu sistem untuk mendukung sistem itu.

### *3. Diferensiasi dalam suatu system*

Lingkungan pada akhirnya akan memberikan energi untuk mengaktifkan suatu system serta informasi tentang arah penggunaan energi. Dengan cara ini suatu sistem dapat melakukan pekerjaannya.

### *4. Integrasi dalam suatu system*

Fakta tentang diferensiasi ini membukakan suatu wilayah yang luas bagi penelitian sistem politik. Diferensiasi struktural ini mengatur kekuatan-kekuatan yang selalu berubah yang secara potensial bisa merusak integrasi sistem itu.

Untuk melakukan berbagai kegiatan seperti sistem politik dibutuhkan lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik yang menjalankan kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkingkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Jadi konsep-konsep system, struktur, dan fungsi itu semuanya merupakan bagian dari proses yang sama. Konsep-konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana politik dipengaruhi oleh lingkungan alam dan lingkungan manusianya serta bagaimana politik mempengaruhi kedua lingkungan itu.

Sistem Politik yang dilakukan oleh Group Bakrie dipengaruhi juga dengan faktor yang lainnya seperti legitimasi, sumber daya dan keanggotaan. Proses input (masukan) yang dilakukan oleh Bakrie mempengaruhi struktur lainnya seperti parelemn; birokrasi dan partai politik. Kenyataan seperti ini akan berpengaruh pada konversi kebijakan sehingga hasil keputusan/output dalam penanggulangan kasus Lapindo diusahakan lebih mengakomodir kebutuhan group Bakrie.

#### **E. Definisi Konsepsional**

Berdasarkan penjelasan diatas, agar tidak terjadi kekaburan dalam menentukan objek penelitian, maka definisi konsepsional yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Negara dan hegemoni**

Hegemoni adalah suatu cara penguasa dalam melakukan kontrol atau memberikan pengaruh kepada pihak kelompok lain.

##### **2. Korporatisme**

Adalah bentuk pemerintahan atau sistem politik yang membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang dibatasi (terbatas) atau yang di organisir (terorganisir).

##### **3. Kelompok Kepentingan**

Kelompok kepentingan adalah individu-individu yang menggabungkan diri dan bergerak berdasarkan kepentingan dalam ranah sosial dan politik.

##### **4. Teori Sistem Politik (David Easton)**



Pengkonversian input menjadi output sehingga berpengaruh pada sistem atau lingkungan itu sendiri.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah mengopersai definisi konsep guna mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian. Menurut Masri Singaribun, definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel itu dapat diukur. Maka perlu ada bahasan-bahasan penelitian dengan menentukan indikator-indikatornya.

Definisi operasional yang dipakai pada skripsi ini adalah

### **1. Teori Korporasi**

Korporatisme berkaitan erat dengan teori otoriterisme, artinya terdapat ciri-ciri dari korporatisme yang merupakan bagian dari otoriterisme. Sebagai sebuah bahasan utama otoriterisme, rezim korporatisme ditandai dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>40</sup>

- Struktur-struktur pemerintahan yang kuat dan relatif otonom
- Terdapat sistem perwakilan kepentingan.
- Terdapat partisipasi politik dari kelompok kepentingan yang berciri terbatas dan selektif.

Menurut teori korporatisme diatas dapat dianalisa bahwa interest group Bakrie tergolong kedalam korporatisme negara. Hal ini ditandai dengan<sup>41</sup>:

1. Posisi pemerintah tertinggi biasanya dipegang oleh kelompok tertentu setelah melalui jenjang karir yang berhasil dalam organisasi yang terbirokratis secara ketat.

2. Peniadaan politik, yang bertujuan untuk menutup jalur akses politik dari sektor populer dan aliansi-aliansinya sehingga mendeaktifisasi mereka secara kolektif.

## **2. Teori Kelompok Kepentingan**

Untuk melihat bagaimana Group Bakrie ini disebut sebagai kelompok kepentingan, maka ada beberapa indikator yang dapat diperhatikan. Diantaranya adalah<sup>42</sup>:

- a. Lobbi langsung atau tidak langsung kepada para pembuat kebijakan
- b. Mendapatkan pengaruh tidak langsung dari partai politik
- c. Mempengaruhi media massa

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penulisan skripsi ini agar tidak meluas dari objek kajian yang sedang dibahas, maka sesuai judul “Hegemoni Korporatisme Negara terhadap rakyat (studi kasus : Keterlibatan Interest Group Bakrie Dalam

---

<sup>41</sup> Nur Iman Subono; op.cit hal 79

<sup>42</sup> Lihat A. P. Hill dan R. S. White, *Corporatism in the United States* (Berkeley: Univ. of California Press, 1977) hal. 6-2824

Penanggulangan Lapindo)” Penulis membatasi waktu penelitian dari tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus 2010, saat Aburizal Bakrie mencalonkan diri menjadi Calon Presiden 2014.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan study ini secara lengkap dapat diterangkan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk pemaparan dan penganalisaan data yang diperoleh berdasarkan landasan teori dalam rangka mencapai kesimpulan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah melalui studi kepustakaan (*Library research*). Metode study kepustakaan berarti sebuah proses pencarian data melalui literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Metode *Library research* (studi kepustakaan) memfokuskan peneliti pada berbagai literatur yang membahas secara langsung maupun tidak langsung mengenai tema yang bersangkutan.<sup>43</sup> Menurut Craswell, tinjauan pustaka dilakukan dalam memenuhi tujuan-tujuan yang antara lain<sup>44</sup>; (1) membagikan atau menginformasikan hasil-hasil penelitian lain yang terkait topik study yang sedang dilaporkan (2)

---

<sup>43</sup> lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 1994, Bandung, Tarsito, hal 251.

menyediakan kerangka kerja yang memberikan argumentasi tentang signifikansi study yang dilakukan, juga memungkinkan untuk upaya perbandingan hasil penelitian dengan temuan yang lain. Dalam penelitian kualitatif, tinjauan pustaka harus digunakan sedemikian rupa sehingga konsisten dengan asumsi metodologis penelitian kualitatif yakni secara induktif, dan tidak mengarahkan secara kaku pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian kualitatif yang berdasarkan teori, bahasan tentang konsep-konsep dan teori-teori kritis yang digunakan diuraikan pada proposal awal penelitian.<sup>45</sup>

Data yang dicari ada dalam bentuk primer dan sekunder. Baik data sekunder maupun data primer dan juga bisa didapat dari koran, majalah, web site internet maupun film dokumenter yang mendukung penelitian. Namun penulis hanya menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder ini berupa koran, majalah maupun jurnal terbitan sejak 2007 sampai sekarang. Dengan metode di atas, diharapkan penulis dapat menganalisa pola hegemoni yang digencarkan oleh Group Bakrie pada kasus penanggulangan lumpur lapindo.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber informasi yang dapat memperkaya informasi dan masalah yang dibahas. Dalam karya tulis ini, perolehan data-data bersumber dasar literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan, yang merupakan sumber data yang berisi teori, fakta, sejarah dan dokumentasi bahan-bahan

lainnya sebagai sumber penunjang. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti di mana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain; hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung, sumber data sekunder berupa dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisa data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Analisa kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual yang menjelaskan suatu gejala dengan melakukan komparasi serta evaluasi.

Metode deskriptif menurut Nazir (2005, hal 54) menjelaskan metode deskriptif yaitu metode dalam meneliti suatu kelompok, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian dengan metode kualitatif akan berupaya untuk mengembangkan ranah penelitian dengan terus menerus memperluas pertanyaan penelitian dan bahkan mengumpulkan penelitian di bidang yang sama.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada BAB awal ini; akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, uraian mengenai teori yang dipakai, definisi konseptual, penjelasan metodologis yang dipakai hingga sistematika penulisan:

### **BAB II Hegemoni dan Perkembangan Korporatisme Negara Group Bakrie di Indonesia**

Menguraikan tentang latar belakang dan sejarah Grup Bakrie, Perjalanan sejarah ekonomi Aburizal Bakrie sebagai komisaris utama, beberapa catatan penting terkait relasi kepentingan Grup Bakrie dengan negara sampai kasus semburan lapindo.

### **BAB III Pola Hegemoni Korporatisme Interest Group Bakrie di Indonesia dan Dampaknya**

Pada BAB ini merupakan bab pembahasan yang akan menguraikan pola hegemoni yang dilakukan Group Bakrie lewat komisaris utamanya Aburizal Bakrie. Penyebaran pola hegemoni ini dimulai dengan cara lobbi jalur hukum, pembentukan sekertariat gabungan, pendekatan melalui struktur keagamaan, pembungkaman intelektual, operasi melalui Dakwa

## **BAB IV      Penutup**

Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, yaitu tentang intisari yang telah diuraikan oleh penulis